



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1017 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2022);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023;

2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 900.1.12/1216 PPM/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022
s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2022.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 3.1 Perubahan Rencana kerja dan perubahan
pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2023.
- 3.2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

BAB IV PENUTUP

- KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.
- KEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBYANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA POKJAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI CIREBON



IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.
- KEEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

TANGGAL : 000.7.2.6/Kep.1017 -DPPKBP3A/2023

NOMOR : 26 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.14	NON BIDANG URUSAN				18.915.744.014,00	44.816.866.457,00	25.901.122.443,00
2.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Prosen	100 Prosen	15.689.715.524,00	19.359.870.716,00	3.670.155.192,00
2.14.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	80.001.200,00	80.001.200,00	-
2.14.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13.515.700,00	13.515.700,00	-
2.14.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12.642.480,00	11.142.300,00	(1.500.180,00)
2.14.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	1 Laporan	74.660.200,00	55.343.200,00	(19.317.000,00)

2.14.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	17.042.659.696,00	17.042.659.696,00	-
2.14.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	80 orang/bulan	101 orang/bulan	13.560.555.500,00	17.030.715.696,00	3.470.160.196,00
2.14.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.031.500,00	3.531.500,00	(1.500.000,00)
2.14.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.412.610,00	8.412.500,00	(110,00)
2.14.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	-
2.14.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik, Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	-
2.14.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	7 dokumen	7 dokumen	524.786.020,00	524.786.020,00	-
2.14.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1 Paket	15.052.600,00	10.285.200,00	(4.767.400,00)
2.14.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	111.441.200,00	112.166.720,00	725,52
2.14.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	25.430.900,00	25.430.900,00	-
2.14.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	16.000 Dokumen	9.500 Dokumen	82.000.000,00	79.000.000,00	(3.000.000,00)
2.14.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 paket	1 paket	141.580.750,00	150.964.600,00	9.383.850,00
2.14.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1 Laporan	13.380.000,00	-	(13.380.000,00)
2.14.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	1 Laporan	41.514.200,00	41.514.200,00	-

2.14.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	105.424.400,00	105.424.400,00	-
2.14.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	9.060.000,00	9.060.000,00	-
2.14.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	9.060.000,00	9.060.000,00
2.14.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan	4 jenis	4 jenis	312.353.300,00	312.353.300,00	-
2.14.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36 Laporan	91.100.784,00	124.783.500,00	33.682.716,00
2.14.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	187.569.800,00	187.569.800,00	-
2.14.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	268 unit	268 unit	1.357.010.500,00	1.357.010.500,00	-
2.14.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	70 Unit	454.197.400,00	454.189.000,00	(8.400,00)
2.14.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	161 Dok	161 Dok	42.705.500,00	33.321.500,00	(9.384.000,00)
2.14.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	22 Unit	296.000.000,00	496.000.000,00	200.000.000,00
2.14.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	373.500.000,00	373.500.000,00	-
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.252.698.440,00	1.861.466.500,00	608.768.060,00
2.08.02.	PROGRAM PENGARUHTAMBAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan pengutan	25 Prosen	25 Prosen	81.070.000,00	81.070.000,00	-

		Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	12,1 Prosen	12,1 Prosen	40.035.000,00	40.035.000,00	-
		Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	36,1 Prosen	36,1 Prosen	58.107.000,00	58.107.000,00	-
2.08.02.2.01.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan BinteK/Seminar Pengarusutamaan Gender	133 Orang	133 Orang	66.070.000,00	66.070.000,00	-
2.08.02.2.01.04.	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	133 Perangkat Daerah	133 Perangkat Daerah	66.070.000,00	66.070.000,00	-
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	175 orang	175 orang	58.107.000,00	58.107.000,00	-
2.08.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan, Kabupaten/Kota	45 Dokumen	1 Dokumen	58.107.000,00	58.107.000,00	-
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	160 Orang	160 Orang	55.035.000,00	55.035.000,00	-
2.08.02.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.08.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Dokumen	1 Dokumen	40.035.000,00	40.035.000,00	-
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan	1,37 Prosen	1,37 Prosen	230.000.000,00	230.000.000,00	-

2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	245 orang	245 orang	121.846.700,00	121.846.700,00	-
		jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	6 Tayangan	6 Tayangan	121.846.700,00	121.846.700,00	-
		Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	6 Tayangan	6 Tayangan	121.846.700,00	121.846.700,00	-
2.08.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Dokumen	1 Dokumen	121.846.700,00	121.846.700,00	-
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	80 Persen	80 Persen	108.153.300,00	108.153.300,00	-
2.08.03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	80 Orang	108.153.300,00	108.153.300,00	-
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0.82 Prosen	0.82 Prosen	280.445.400,00	430.445.300,00	149.999.900,00
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan	100 orang	100 orang	153.004.000,00	153.004.000,00	-
2.08.04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Laporan	1 Laporan	153.004.000,00	153.004.000,00	-
2.08.04.2.03.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan kompetensi	138 orang	138 orang	277.441.300,00	277.441.300,00	-

2.08.04.2.03.01.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	138 Layanan	138 Layanan	127.441.400,00	277.441.300,00	149.999.900,00
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	100 Prosen	100 Prosen	168.041.140,00	168.009.400,00	(31.740,00)
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	tersedianya buku data terpilah gender dan anak	120 Buku	120 Buku	168.009.400,00	168.009.400,00	-
2.08.05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak, Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Dokumen	120 Dokumen	168.041.140,00	168.009.400,00	(31.740,00)
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2.28 Prosen	2.28 Prosen	394.999.900,00	414.999.900,00	20.000.000,00
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	1.425 Orang	1.425 Orang	414.999.900,00	414.999.900,00	-
2.08.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan, Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	53.314.200,00	53.314.200,00	-
2.08.06.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	635 Dokumen	1 Dokumen	230.374.800,00	250.374.800,00	20.000.000,00
2.08.06.2.02.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	1 Dokumen	111.310.900,00	111.310.900,00	-
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Prosen	100 Prosen	-	438.799.900,00	438.799.900,00

2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	360 orang	360 orang	109.718.700,00	109.718.700,00	-
2.08.07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Dokumen	1 Dokumen	-	109.718.700,00	109.718.700,00
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	48 layanan	48 layanan	254.485.000,00	254.485.000,00	-
2.08.07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Layanan	48 Layanan	-	254.485.000,00	254.485.000,00
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	115 orang	115 orang	74.596.200,00	74.596.200,00	-
2.08.07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan, Kabupaten/Kota	110 Dokumen	1 Dokumen	-	74.596.200,00	74.596.200,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	tersediannya informasi data keluarga	100 persen	100 persen	632.251.580,00	1.133.051.200,00	500.799.620,00
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.800,00	39.999.800,00	-

2.14.02.2.01.02.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	39.999.800,00	39.999.800,00
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 bulan	12 bulan	1.093.051.400,00	1.093.051.400,00	-
2.14.02.2.02.09.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	40 Laporan	40 Laporan	-	64.200.000,00	64.200.000,00
2.14.02.2.02.12.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	1 Laporan	632.251.580,00	969.451.400,00	337.199.820,00
2.14.02.2.02.13.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	25 Dokumen	25 Dokumen	-	59.400.000,00	59.400.000,00
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	25,3 Prosen	25,3 Prosen	370.316.300,00	4.370.992.497,00	4.000.676.197,00
		Peningkatan CU/P/US	75,2 Prosen	75,2 Prosen	89.039.550,00	1.395.264.051,00	1.306.224.501,00
		Jumlah pendidik/Motivator sebaya	340 Orang	340 Orang	43.604.900,00	43.604.900,00	-
		Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	10 Kampung KB	10 Kampung KB	456.778.100,00	4.076.220.860,00	3.619.442.760,00
		Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	20,1 Tahun	20,1 Tahun	43.856.900,00	833.691.300,00	789.834.400,00
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	40 Kecamatan	40 Kecamatan	1.420.445.666,00	1.420.445.666,00	-
2.14.03.2.01.01.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	40 Organisasi	162.775.800,00	282.049.800,00	119.274.000,00

2.14.03.2.01.04.	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media, Luar Ruang	66 Dokumen	66 Dokumen	-	149.942.400,00	149.942.400,00
2.14.03.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	210 Laporan	1 Laporan	43.856.900,00	563.856.900,00	520.000.000,00
2.14.03.2.01.07.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	40 Laporan	40 Laporan	-	344.736.566,00	344.736.566,00
2.14.03.2.01.08.	Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program, KKBPk	63 Laporan	63 Laporan	-	79.860.000,00	79.860.000,00
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	3.250 Orang	3.250 Orang	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	-
2.14.03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Meningkatnya cakupan laporan Program Bangsa Kencana di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB		424 Kader KB	-	622.000.000,00	622.000.000,00
2.14.03.2.02.04.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.200 Orang	3.200 Orang	-	848.000.000,00	848.000.000,00
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB Baru	87.000 orang	87.000 orang	5.949.995.882,00	5.949.995.882,00	-
2.14.03.2.03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	5 Laporan	-	73.488.000,00	73.488.000,00

2.14.03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan, Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.300 Orang	7.300 Orang	370.316.300,00	3.748.992.497,00	3.378.676.197,00
2.14.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penujangan Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penujangan Pelayanan KB	5 unit	5 unit	-	1.914.839.000,00	1.914.839.000,00
2.14.03.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	400 Laporan	1 Laporan	-	40.032.000,00	40.032.000,00
2.14.03.2.03.12.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	855 orang	855 orang	89.039.550,00	129.039.485,00	39.999.935,00
2.14.03.2.03.13.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan, Kesertaan KB Pria	100 Orang	100 Orang	43.604.900,00	43.604.900,00	-
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	10 Kampung KB	10 Kampung KB	1.879.332.060,00	1.879.332.060,00	-
2.14.03.2.04.02.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terselenggaranya konvergensi program di Kampung Keluarga Berkualitas		75 OPD	-	8.850.000,00	8.850.000,00
2.14.03.2.04.03.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di, Kampung KB	10 Kampung	10 Kampung	294.002.300,00	1.870.482.060,00	1.576.479.760,00
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELAJHTERA (KS)	Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	57,52 Prosen	57,52 Prosen	337.482.720,00	11.742.704.433,00	11.405.221.713,00
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	72.822 Anggota	72.822 Anggota	11.742.704.433,00	11.742.704.433,00	-

2.14.04.2.01.02.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 unit	2 unit	-	360.000.000,00	360.000.000,00
2.14.04.2.01.03.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Laporan	1 Laporan	61.104.870,00	78.104.648,00	16.999.778,00
2.14.04.2.01.05.	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	41.360 orang	41.360 orang	-	11.028.222.000,00	11.028.222.000,00
2.14.04.2.01.06.	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kelompok	10 Kelompok	276.377.850,00	276.377.785,00	(65,00)
J U M L A H					18.915.744.014,00	44.816.866.457,00	25.901.122.443,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 September 2023
Nomor : 400.13 / 1907 /DPPKBP3A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kesiediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

23/9/23

Dipermaklumkan dengan hormat, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;